

Kepercayaan Politik Mahasiswa Santri terhadap Kiai dalam Perspektif Psikologi Perkembangan

Taufiqurrahman
Fakultas Psikologi
Universitas Merdeka Malang

Fathul Himam
Fakultas Psikologi
Universitas Gadjah Mada

Abstract

This Research with the phenomenological approach aimed to understand meaning of political trust of *mahasiswa santri* and knowing the psychological processes underlying, by describe meaning of relationship between *mahasiswa santri* and *Kiai* in the social system in pesantren as the basis of political relationships that occur in it. This study used in-depth interviews to collect data from 5 respondents. Collection of respondents used snow-ball technique. The validity of our results used the intersubjective validity. The results showed that students' political trust against *Kiai* was the form of identification based on paternalistic interpersonal relationships. Paternalism bring political inklusivisme that is strengthened by the judge of competency consistency and performance of *kiai* as political leaders.

Keywords: political trust, identification, interpersonal relationships, political inklusivisme

Abstrak

Penelitian dengan pendekatan fenomenologi ini bertujuan untuk memahami pemaknaan kepercayaan politik mahasiswa dan mengetahui proses-proses psikologis yang mendasarinya dengan melihat pemaknaan hubungan mahasiswa satri dengan kiai dalam sistem sosial yang ada di pesantren sebagai basis hubungan politik yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini menggunakan wawancara yang mendalam untuk mengumpulkan data dari 5 responden. Pengumpulan responden dengan menggunakan teknik *snow-ball*. Validitas hasil penelitian dengan menggunakan *intersubjective validity*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepercayaan politik mahasiswa santri terhadap kiai merupakan bentuk identifikasi yang didasarkan pada relasi interpersonal yang paternalistik. Paternalisme melahirkan inklusivisme politik dalam kelompok yang dikuatkan oleh penilain terhadap konsistensi kompetensi dan performansi kiai sebagai pemimpin politik.

Kata kunci: kepercayaan politik, identifikasi, relasi interpersonal, inklusivisme politik

Pengantar

Peran kiai dalam sistem sosial masyarakat Madura tidak hanya sebagai pemimpin agama, namun juga menjadi pemimpin politik. Keberadaan kiai sebagai tokoh politik dapat dilihat dengan nyata pada pimpinan pemerintahan empat kabupaten yang ada di Madura. Tiga Kabupaten dipimpin oleh

Bupati yang notabene adalah kiai, yakni Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Satu Kabupaten lainnya, yakni Sampang menempati posisi sebagai Wakil Bupati. Keberhasilan Kiai menduduki pucuk pemerintahan tersebut merupakan hasil kemenangan politik dalam pemilihan langsung yang diselenggarakan di Kabupaten masing-masing.

Fakta tersebut seolah menegaskan bahwa kiai tidak hanya berperan sebagai tokoh (pemimpin) agama, tetapi juga berperan

Korespondensi mengenai artikel ini dapat dilakukan dengan menghubungi: Taufiqurrahman, S.Psi., MA. Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Jl. Terusan Raya Dieng 62-64, Malang, (0341) 578820. Email: chonkptopik@gmail.com

sebagai tokoh (pemimpin) politik. Keberadaan kiai sebagai tokoh politik tidak lepas dari modal sosial yang dimilikinya. Sebagai ulama dalam konteks sosio-kultural masyarakat Madura kiai mempunyai pengaruh dan kekuasaan informal yang besar (Mansurnoor, 1990). Bahkan, kiai bisa lebih berpengaruh dari pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah, terutama bagian bawah, hanya berfungsi sebagai pejabat administrasi (de Jonge, 1989).

Modal sosial paling nyata yang dimiliki kiai adalah keberadaan pesantren, dimana kiai merupakan pemimpin pesantren. Dalam sistem pendidikan pesantren, kiai merupakan *legitimate authority*. Kiai sebagai pemegang otoritas yang sah di pesantren mendapat penegasan secara doktrinal dari kitab *Ta'lim Muta'alim*. Salah satu doktrin tersebut, misalnya kiai adalah penguasa ilmu yang harus dihormati dan dimuliakan santri-santrinya yang sedang menjadi hamba-hamba ilmu. Bentuk penghormatan dan pemuliaan ini adalah mengikuti perintah dan permintaannya (Dhofier, 1982). Kiai sebagai otoritas dalam sistem sosial dalam budaya pesantren merupakan jaringan kultural yang terbangun sejak lama dalam konteks kesejarahan Islam di Indonesia mengidentifikasi antara santri dan kiai terdapat sebuah pola relasi emosional layaknya tradisi feodal (Geertz, 1983).

Pola relasi emosional dengan menempatkan kiai sebagai *legitimate authority* dalam budaya pesantren tersebut merupakan modal sosial yang dimiliki kiai untuk mendapatkan kepercayaan politik dari

santrinya. Misztal menyatakan bahwa kepercayaan (politik) terkait dengan konsep modal sosial, *civil society* dan *social cooperation*. Syarif (2007) dalam penelitiannya memperlihatkan politik santri masih beorientasi pada kepatuhan terhadap kiai yang mempertahankan pesona sebagai sosok *religious-charismatic* melalui simbol-simbol kepatuhan yang dibingkai nilai moral agama dalam mempertahankan kepatuhan santrinya. Dalam hal ini Zakiah dan Faturachman (2004) juga menyebutkan kepercayaan yang kuat kaum santri, khususnya di kalangan NU, terhadap kainya seolah-olah sebagai bentuk kepercayaan buta.

Kepercayaan politik terhadap kiai yang lahir dari norma kepatuhan dengan sendirinya menjadi tuntutan bagi semua santri, termasuk santri yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang dalam konteks penelitian ini disebut sebagai mahasiswa santri. Seperti mahasiswa pada umumnya, mahasiswa santri rata-rata berusia 18-24 tahun. Dalam perspektif psikologi perkembangan usia tersebut dikategorikan sebagai tahapan remaja akhir. Mönks, Knoers, dan Haditono (2001) menyatakan awal masa remaja dimulai 12 tahun dan remaja akhir dimulai sekitar umur 18 tahun sampai 24 tahun.

Sebagai satu fase dalam proses perkembangan, tahapan remaja seringkali disebut sebagai masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Fase transisi ini ditandai hasrat untuk melepaskan pengaruh otoritas yang sebelumnya determinan dalam hidupnya.

Monks, dkk. (2001) menjelaskan bahwa remaja diliputi penuh dengan cita-cita akan kehidupan yang bebas, mandiri lepas dari ikatan rumah dan lingkungannya.

Kecenderungan remaja untuk bersikap otonom tersebut tidak lepas dari perkembangan pemikiran remaja yang dalam perspektif psikologi perkembangan kognitif diklasifikasikan oleh Piaget sebagai tahapan operasional formal. Tahapan ini ditunjukkan oleh kemampuan untuk berpikir abstrak yang ditandai dengan kemampuan individu untuk melakukan penalaran hipotetik-deduktif (Papalia dkk, 2010). Mereka juga peka tentang politik dan sikap mereka terhadap aturan-aturan perilaku juga berbeda dari yang ada pada anak-anak yang lebih muda usianya. Ketika seorang remaja berpendapat bahwa aturan tertentu yang telah digariskan tidak bisa dijalankan, ia cenderung mengusulkan perubahan (Salkind, 2004).

Menjadi mahasiswa bagi sebagian besar remaja akhir dalam masyarakat modern adalah pilihan untuk mendukung kemampuan berpikirnya. Dalam hal ini, Montgomery dan Cote (2003) menjelaskan bahwa perguruan tinggi merupakan jalur penting menuju kedewasaan. Perkuliahan dapat menjadi periode penemuan intelektual dan pertumbuhan pribadi, terutama dalam keterampilan verbal dan kuantitatif, berpikir kritis, serta penalaran moral.

Hasrat untuk bebas dan mandiri dalam kehidupannya yang disangga cara berpikir hipotetik-deduktif, bertolak belakang dengan

lingkungan mahasiswa santri di pesantren yang menuntut kepatuhan (sebagai norma) kepada otoritas (kiai). Kontradiksi tersebut menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini yang ditujukan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan kepercayaan politik mahasiswa santri terhadap kiai.

Kepercayaan Politik

Rottter (1980) dan Luhman (1988) mengartikan kepercayaan sebagai harapan seseorang terhadap orang lain dan sistem sosial. Miller dan Rempel (2004) mendefinisikan kepercayaan sebagai sejumlah pengharapan kognitif dan emotif terhadap apa yang akan terjadi dimasa depan. Scanzoni (1979) mendeskripsikan kepercayaan sebagai bentuk harapan seseorang untuk menata dan menyerahkan aktivitas kepada orang lain dengan mengharapakan kepuasan. Mayer dkk (1995) menyebutkan faktor dari kepercayaan; kemampuan (*ability*), kebajikan (*benevolence*), dan integritas (*integrity*).

Merujuk pada ulasan tentang konsep kepercayaan di atas, maka pada dasarnya kepercayaan politik tidak berbeda dengan kepercayaan pada umumnya. Kepercayaan politik dalam konseptualisasinya menfokuskan pada keterkaitan politik beserta variannya dengan kepercayaan. Seperti dalam penjelasan Miztal (2001) bahwa kepercayaan politik dapat diartikan sebagai kepercayaan individu terhadap komponen-komponen sistem politik yang berlaku saat ini.

Kepercayaan politik terjadi jika warga menilai insitusi pemerintahan, pembuat kebijakan dan/atau pemimpin politik mampu menepati janji politiknya, efisien, adil, dan jujur (Blind, 2006). Citrin (1974) menyebut kepercayaan politik sebagai bentuk evaluasi kualitas etis dari pimpinan politik, bukan sistem politik. Zhang dan Wang (2010) menerangkan kepercayaan politik kepada pemerintah ditentukan oleh kesesuaian kebijakan yang dihasilkan dengan harapan masyarakat secara umum.

Miztal (2001) menjelaskan kepercayaan terkait dengan konsep modal sosial, masyarakat sipil, dan kerjasama sosial. Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial merupakan institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Prusak dan Cohen (2001) menjelaskan modal sosial sebagai setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), kesaling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Bourdieu (1986) menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di

dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu). Partha dan Ismail (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama.

Schyn & Koop (2010) menjelaskan politik sangat terkait dengan modal sosial, karena memang dunia politik tidak bisa dipisahkan dari dunia sosial. Modal sosial dengan sendirinya dapat bertransformasi menjadi modal politik. Hick dan Misra (1993) menjelaskan bahwa modal politik adalah pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan.

Kiai dan Politik

Keterlibatan kiai dalam praktik politik bukanlah tema baru dalam konfigurasi kehidupan bernegara di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda banyak kiai yang berperan sebagai pemimpin gerakan anti penjajahan (Kurasawa, 1993). Peristiwa penentangan sosial-politik terhadap penguasa kolonial, menurut laporan pemerintah Belanda sendiri, dipelopori oleh para kiai sebagai pemuka agama, para haji dan guru-guru ngaji (Kartodirdjo, 1981).

Fadhillah (2007) menyebutkan bentuk dan orientasi aktifitas politik kiai dapat dibedakan menjadi tiga kategori: *pertama*, tipe budaya politik kiai pesantren parokial (*apathies*). *Kedua*, budaya politik kiai sebagai partisipan pasif. *Ketiga*, budaya politik kiai partisipan, yaitu kiai pesantren yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik.

Dalam area penelitian ini, kiai tidak hanya sebagai ulama yang mengajarkan agama. Dalam masyarakat Madura mempunyai pengaruh dan kekuasaan informal yang besar (Mansurnoor, 1990). Kiai bisa lebih berpengaruh dari pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah, terutama bagian bawah, hanya berfungsi sebagai pejabat administrasi (De Jonge, 1989).

Dalam lingkungan pesantren, selain sebagai ulama yang mengajarkan agama kepada santri, kiai merupakan pemilik sekaligus pemimpin. Sehingga santri mengidentifikasi kiai sebagai figur yang penuh kharisma dan wakil atau pengganti orang tua (Mufid, 1993). Kiai adalah model (*uswah*) dari sikap dan tingkah laku santri. Proses sosialisasi dan interaksi yang berlangsung di pesantren memungkinkan santri melakukan imitasi terhadap sikap dan tingkah-laku kiai. Santri juga dapat mengidentifikasi kiai sebagai figur ideal sebagai penyambung silsilah keilmuan para ulama pewaris ilmu masa kejayaan Islam di masa lalu (Wahid, 1988).

Peran kiai sebagai tokoh agama dan pemimpin pesantren merupakan bentuk

modal sosial bagi kiai. Boudieu (1986) menjelaskan modal hubungan sosial yang jika diperlukan akan memberikan dukungan-dukungan yang bermanfaat. Raffo dan Revees (2000) juga menjelaskan bahwa modal sosial terkait erat dengan komunitarianisme, dengan pandangan romantisnya tentang ikatan lokal dan solidaritas berbasis tradisi.

Syarif (2007) melakukan penelitian dengan pendekatan fenomenologi tentang dinamika politik kiai dan santri dalam pilkada Pamekasan menemukan; pertama, formula politik kiai yang digunakan dalam mempertahankan otoritas kepemimpinannya terhadap santri bertumpu pada dua kekuatan yaitu; *traditional* dan *charismatic domination*. Dari perilaku politik santri tersebut ditemukan tiga tipologi politik santri yaitu : santri patuh mutlak, santri patuh semu, dan santri *prismatic*.

Mahasiswa Santri Perspektif Psikologi Perkembangan

Seperti mahasiswa pada umumnya, mahasiswa santri rata-rata berusia 18-24 tahun. Dalam perspektif psikologi perkembangan usia tersebut dikategorikan sebagai tahapan remaja akhir. Monks dkk (2001) menyatakan awal masa remaja dimulai 12 tahun dan remaja akhir dimulai sekitar umur 18 tahun sampai 24 tahun. Santrock (2003) menyebutkan remaja dimulai dari usia sekitar 10-13 tahun yang disebut remaja awal dan berakhir usia 18-22 tahun yang disebut remaja akhir.

Menurut Mönks dkk (2001) remaja secara mental tidak suka lagi asal menurut atau patuh pada orang tua. Remaja dimasa ini diliputi penuh dengan cita-cita akan kehidupan yang bebas, mandiri lepas dari ikatan rumah dan lingkungannya. Steinberg dan Silverberg (1986) ada empat proses perkembangan kemandirian remaja, yaitu: *de-idealized*, *authority figure as people*, *non-dependency*, dan *Individuated*.

Piaget mengkategorikan tahap remaja sebagai tahapan operasional formal yang ditandai oleh kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan pemecahan masalah atas suatu masalah. Mereka juga peka tentang politik dan sikap mereka terhadap aturan-aturan perilaku juga berbeda dari yang ada pada anak-anak yang lebih muda usianya. Ketika seorang remaja berpendapat bahwa aturan tertentu yang telah digariskan tidak bisa dijalankan, ia cenderung mengusulkan perubahan (Salkind, 2004).

Bagi remaja, perkuliahan dapat menjadi periode penemuan intelektual dan pertumbuhan pribadi, terutama dalam keterampilan verbal dan kuantitatif, berpikir kritis, serta penalaran moral (Montgomery & Cote, 2003). Pengalaman perguruan tinggi dapat mengarah ke perubahan fundamental dalam cara berpikir mahasiswa (Fischer dan Pruyne, 2003). Mahasiswa memiliki cara berpikir mereka bergerak maju dari kekakuan ke fleksibilitas dan akhirnya ke berbagai komitmen yang dipilih secara bebas (Perry, 1970)

Secara keseluruhan perspektif teoritik yang diuraikan sebelumnya dapat dijadikan kerangka konsep dalam membangun rumusan permasalahan penelitian ini yang dirumuskan dalam *grand tour question* yaitu bagaimana makna pengalaman kepercayaan politik mahasiswa santri kepada kiai?

Untuk memperdalam *grand tour question* tersebut maka dijabarkan sub-pertanyaan sebagai berikut: 1) bagaimana dinamika psikologis (pemaknaan) relasi kepatuhan santri dengan kiai sebagai basis etis dari kepercayaan politik santri terhadap kiai?; 2) bagaimana dinamika psikologis pengalaman individu sebagai pemberi kepercayaan politik kepada kiai dalam menyalurkan (berpartisipasi) hak-hak (aspirasi) politiknya?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang disebut Giorgi (1970) sebagai *phenomenological psychology* yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi yang akurat dari pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini sangat mengedepankan apa yang dialami langsung dari seseorang (*first-hand experience*). Mengikuti metode filsafat fenomenologi yang dirumuskan Husserl, Moustakas memberikan penjelasan tentang beberapa proses inti dalam penelitian fenomenologi : *epoche*, *phenomenological reduction*, *imaginative variation*, dan *synthesis of meanings and essences* (Moustakas, 1994).

Responden Penelitian

Responden dipilih dengan menggunakan prosedur *purposive sampling* dan diperoleh dengan cara *snow-ball*, yaitu melalui referensi dari seorang relasi/teman atau responden ke responden yang lain, dan seterusnya. Jumlah responden yang berkisar antara 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) ini dirasa sudah cukup karena telah memenuhi persyaratan metodologi untuk penelitian fenomenologi (Dukes, 1984).

Sesuai dengan tema penelitian ini, responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang studi di beberapa perguruan tinggi dan tinggal di pondok pesantren (santri) dalam wilayah Kabupaten Pamekasan, yang dalam penelitian ini disebut sebagai mahasiswa santri.

Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*). Moustakas (1994) mengemukakan bahwa wawancara dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu wawancara informal, pertanyaan terbuka, dan wawancara yang berpedoman pada pertanyaan peneliti.

Prosedur Analisis Data

Moustakas (1994) menyajikan salah satu model analisis data fenomenologi yaitu modifikasi dari Van Kaam yakni; pendaftaran dan pengelompokan Awal (*Horizontalizing*), melakukan reduksi dan eliminasi untuk menentukan komponen pembentuk (*Invariant Constituents*), membangun sebuah *Individual Textural Description* tentang pengalaman

untuk membangun sebuah *Individual Structural Description* tentang pengalaman yang dijelaskan dengan *Imaginative Variation*, membangun sebuah *Textural-Structural Description* tentang arti dan esensi pengalaman sehingga dihasilkan sebuah *Composite Description* yang mewakili kelompok secara keseluruhan.

Teknik Verifikasi

Validasi akhir dilakukan dengan melakukan *intersubjective validity* yaitu pengujian kembali (*testing out*) pemahaman peneliti dengan pemahaman responden melalui interaksi sosial yang timbal balik (*back - and - forth*) (Creswell, 1993).

Hasil

Temuan penelitian ini menunjukkan kepercayaan politik mahasiswa santri terhadap kiai merupakan bentuk identifikasi terhadap kiai. Identifikasi disini merujuk pada konsep konformitas dalam psikologi sosial dimana identifikasi dikonsepsikan sebagai puncak kompromi dan kepatuhan mahasiswa santri yang memposisikan diri sebagai anggota kelompok terhadap kiai yang ditempatkan sebagai pimpinan kelompok.

Secara terperinci komponen pembentuk (*invariant constituent*) fenomena identifikasi dapat dideskripsikan secara tekstural (*tekstural description*) yang juga disertai dengan penjelasan (deskripsi) struktural berikut ini.

Responden Memiliki Latar Belakang Keluarga Santri

Semua responden menyatakan dirinya sebagai keluarga santri, dimana ada anggota keluarga yang juga pernah dan sedang mengenyam pendidikan pesantren. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama dan utama bagi responden untuk bersosialisasi. Keluarga sendiri berada di dalam sistem sosial yang memiliki nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap keluarga santri di Pamekasan memperlihatkan santri-santri yang sedang menempuh pendidikan (mondok) di pesantren berasal dari keluarga yang anggota keluarga lainnya, terutama orang tuanya juga pernah menempuh pendidikan di pesantren. Dengan demikian, belajar di pesantren merupakan nilai budaya pada sebagian orang tua dalam masyarakat Madura (Pamekasan) yang ditransmisikan kepada anak-anaknya.

Kebutuhan dan Tuntutan Belajar Agama di Pesantren

Selain peran keluarga, responden menyatakan masuk pesantren juga karena keinginannya sendiri yang didasarkan pada kebutuhan untuk belajar ilmu agama, serta tuntutan (kewajiban) dari agama itu sendiri. Kebutuhan dan tuntutan belajar agama dirasakan oleh responden terpenuhi melalui kajian-kajian kitab keagamaan yang diselenggarakan di pesantren yang diajarkan oleh kiai dan ustadz. Namun antara kiai dan

ustadz memiliki posisi yang berbeda dalam penilaian responden. Ustadz bagi responden pada dasarnya juga santri yang lebih senior dan lebih pintar daripada santri lainnya dan juga masih belajar ilmu agama (kitab) kepada kiai.

Deskripsi tersebut dapat dijelaskan sebagai deskripsi motivasi responden masuk dan tinggal di pesantren dan dapat dilihat sebagai konteks yang melatari hubungan sosial antara santri dan kiai yang terjadi di lingkungan pesantren termasuk pola interaksi yang berlaku di dalamnya.

Makna Relasi Interpersonal dengan Kiai

Hubungan sosial yang dijalin responden dengan kiai merupakan hubungan yang bertujuan untuk belajar agama sehingga dapat dimaknai sebagai relasi interpersonal. Dalam penelitian ini relasi interpersonal tersebut dapat dilihat dari pemaknaan responden yang secara seragam menilai kiai adalah guru yang mengajarkan beragam ilmu keagamaan melalui kajian-kajian kitab keagamaan yang diselenggarakan di pesantren. Selain sebagai guru, kiai dianggap responden sebagai pengganti orang tua selama tinggal di pesantren. Pemaknaan terhadap kiai tersebut merupakan persepsi interpersonal yang secara bersamaan responden juga merumuskan konsep dirinya sebagai santri yang memiliki kewajiban untuk selalu hormat dan taat kepada kiai.

Dari rumusan pemaknaan interpersonal terhadap kiai dan konsep diri tersebut

menjelaskan bagaimana responden memerankan diri sebagai murid dan kiai diperankan sebagai guru dalam konteks pembelajaran ilmu keagamaan di pesantren. Walaupun dalam prakteknya tidak hanya kiai yang mengajarkan ilmu keagamaan dalam pengajian kitab, namun bagi responden kiai merupakan otoritas tunggal dalam ilmu keagamaan dengan predikatnya sebagai ulama. Sehingga dapat dijelaskan makna relasi interpersonal responden dengan kiai adalah relasi murid dan guru, dalam hal ini kiai juga dapat disebut sebagai pemimpin dalam sistem pembelajaran di pesantren.

Kepemimpinan kiai di pesantren juga dapat dilihat dari peran kiai sebagai pengganti orang tua bagi responden selama tinggal di pesantren. Sebagai pengganti orang tua, kiai disebut responden sebagai pengasuh, dimana dalam sistem organisasi sosial di pesantren pengasuh secara struktural menempati posisi paling tinggi. Struktur sosial yang dilandasi oleh nilai moral untuk hormat dan taat kepada kiai sebagai pemimpin menunjukkan struktur sosial yang terbangun di pesantren bersifat paternalistik.

Dinamika Interaksi dengan Kiai

Intensitas pertemuan responden dengan kiai hanya terjadi pada saat pengajian kitab dengan kiai sebagai pengajarnya dan tidak pernah melakukan percakapan langsung dengan kiai. Karena dalam interaksi sosial di pesantren hal itu tidak biasa terjadi.

Dalam interaksi pembelajaran, tugas responden sebagai pembelajar hanya mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh kiai dan tidak pernah bertanya pada kiai tentang apa yang tidak dipahami. Tiga ragam alasan yang muncul; pertama, tidak ada sesi (waktu) tanya jawab. Kedua, responden merasa apa yang disampaikan oleh kiai sudah jelas dan bisa dipahami dengan baik. Ketiga, responden tidak memiliki keberanian untuk bertanya kepada kiai.

Pola interaksi yang dijalani responden tersebut menandakan ekspresi sikap submisif yang ditunjukkannya dengan menyatakan bahwa responden sebagai santri merasa canggung dan tidak wajar serta kurang etis melakukan percakapan dengan kiai. Percakapan antara responden dengan kiai terjadi hanya jika kiai yang berinisiatif atau menginginkannya. Selain sikap submisif, interaksi yang dijalani responden dengan kiai juga tidak disertai oleh perilaku asertif yang dinyatakan responden dengan ketidakberaniannya untuk menanyakan kepada kiai tentang apa yang tidak dipahaminya pada saat pengajian kitab.

Dinamika interaksi yang terjadi tersebut menjadi varian yang menguatkan sikap paternalisme responden dalam menjalin relasi interpersonal dengan kiai di pesantren. Paternalisme dalam struktur sosial di pesantren dengan sendirinya menjadi modal sosial bagi kiai. Modal sosial yang terbentuk melalui peran kiai yang ditempatkan sebagai

pemimpin yang disertai oleh nilai-nilai yang mewajibkan untuk dihormati dan ditaati oleh responden sebagai santri.

Pengalaman Dukungan Politik terhadap Kiai

Dalam kehidupan politik, responden menyalurkan aspirasi politiknya kepada kiai. Pada waktu pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Pamekasan ada tiga pasang calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju untuk mengikuti pemilihan yang salah satunya berasal dari kalangan kiai. Sebagai santri, responden memberikan dukungan politiknya terhadap calon yang berasal dari kalangan kiai. Bentuk dukungan yang diberikan adalah dukungan langsung dan tidak langsung. Dukungan langsung diberikan responden dengan menggunakan hak pilihnya dengan memilih calon yang berasal dari kalangan kiai.

Dukungan tidak langsung yang diberikan oleh responden terhadap pencalonan kiai menjadi bupati adalah dengan berpartisipasi atau turut serta menggalang dukungan untuk kiai. Penggalangan dukungan yang dilakukan responden adalah mengajak keluarga dan teman-teman dekatnya dengan mengajak mereka mengikuti kampanye, berdiskusi dan melalui SMS.

Penilaian terhadap Kiai sebagai Pemimpin Politik

Kepercayaan politik responden yang diimplementasikan dalam bentuk dukungan politik yang diberikan kepada kiai juga tidak lepas dari penilaian responden terhadap

kompetensi dan performansi kiai sebagai pemimpin politik. Kompetensi kiai sebagai pemimpin politik terlihat dari atribusi responden terhadap keterlibatan kiai dalam politik praktis. Sedangkan performansi merupakan bentuk evaluasi responden terhadap kinerja kiai selama menjabat bupati.

a) Kompetensi kiai sebagai pemimpin politik

Predikat ulama yang disandang kiai merupakan potensi yang mampu menjadikan kiai memiliki kompetensi sebagai pemimpin politik yang diyakini akan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Sehingga kiai dapat menjadi pemimpin politik yang dapat memberikan contoh perilaku yang baik bagi masyarakat.

Selain keteladanan tersebut, sebagai ulama menurut responden kiai juga memiliki kompetensi lainnya untuk menjadi pemimpin politik. *Pertama*, nilai-nilai agama yang menjadi basis karakter kepemimpinan kiai dalam pandangan responden kiai akan membawa kemaslahatan ummat. *Kedua*, pandangan tersebut didukung oleh rekam jejak kiai sebagai pemuka agama yang sering memberikan ceramah kegamaan pada masyarakat luas sehingga kiai dinilai dekat (terutama) dengan masyarakat kecil. *Ketiga*, sebagai tokoh agama, kiai memiliki jaringan luas termasuk dengan kalangan pemerintahan sehingga kiai diyakini mengetahui tata kelola pemerintahan dari jaringannya tersebut. *Keempat*, ditengah stigma politik kotor dalam praktek politik

selama ini, kiai mampu berpolitik yang beretika sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama.

b) Performansi kiai sebagai pemimpin politik

Performansi kiai sebagai pemimpin politik dilihat oleh responden dari pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan kiai selama menjabat Bupati. *Pertama*, di bidang pemerintahan kiai dapat mengelola pemerintahan dengan baik. *Kedua*, di bidang pendidikan kiai memiliki perhatian terhadap pengembangan pendidikan. *Ketiga*, pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan selama kiai menjabat. *Keempat*, selama kiai menjabat Bupati menurut responden ada usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Deskripsi penilaian performansi tersebut menunjukkan kiai sebagai pemimpin politik (Bupati) bagi responden telah menjalankan tugas-tugas atau tanggung jawabnya dengan baik. Penilaian ini selaras dengan penilaian terhadap kompetensi kiai sebagai pemimpin politik yang diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, bagi responden ada konsistensi antara kompetensi dan performansi kiai sebagai pemimpin politik. Penilaian terhadap konsistensi kepemimpinan politik kiai tersebut menjadi penguat bagi responden dalam memberikan kepercayaan politiknya.

Kategorisasi Kelompok dalam Politik

Responden yang menempatkan kiai sebagai pemimpin kelompoknya secara

otomatis dalam kancah politik pun responden mengkategorikan kiai sebagai pemimpin politik dalam kelompoknya sedangkan dari kalangan yang bukan kiai dikategorikan sebagai bukan kelompok politiknya (*political outgroup*). Kategorisasi tersebut menghasilkan sikap mengunggulkan kelompoknya (*ingroup favoritism*) yang berujung pada inklusivisme dengan menganggap kiai sebagai pemimpin politik akan selalu lebih baik dari pemimpin politik yang bukan dari kalangan kiai.

Reaksi Emosi terhadap Kemenangan Politik

Tercapainya harapan politik dengan kemenangan politik yang ditandai oleh keberhasilan kiai meraih jabatan politik sebagai bupati menghasilkan emosi yang menyenangkan bagi responden berupa rasa senang, puas dan bangga. Reaksi emosi responden tersebut merupakan konsekuensi dari kepercayaan politik yang memiliki unsur harapan di dalamnya. Responden yang memberikan kepercayaan politik yang diimplementasikan dalam bentuk dukungan politik memiliki harapan agar kiai memenangi pemilihan politik yang diselenggarakan.

Diskusi

Berdasarkan hasil wawancara dan *intersubjective validity* secara konsisten kepercayaan politik mahasiswa santri terhadap kiai dalam penelitian ini diketahui sebagai hasil identifikasi. Kelman (1958) menjelaskan identifikasi sebagai puncak dari kompromi dan kepatuhan terhadap pemimpin. Identifikasi

mahasiswa santri merupakan dampak pengaruh sosial melalui hubungan interpersonal dengan kiai di pesantren. Relasi interpersonal yang menempatkan kiai sebagai pemimpin kelompok dan mahasiswa santri menempatkan diri sebagai anggota kelompok.

Sebagai anggota kelompok dalam struktur sosial di pesantren, responden menempatkan dirinya pada posisi sub-ordinat dalam pola relasi yang dijalankannya dengan kiai, sedangkan kiai ditempatkan pada posisi superior. Mahasiswa santri yang berada pada posisi sub-ordinat diikat oleh norma yang mewajibkannya untuk hormat dan taat kepada kiai. Dalam perspektif psikologi perkembangan Santrock (1996) menjelaskan bahwa struktur kekuasaan orang dewasa menempatkan remaja dalam posisi submisif, yang membatasi pilihan mereka, mendorong timbulnya ketergantungan. Padavic dan Ernest (1994) menyebutkan bahwa hormat dan taat yang melandasi hubungan tersebut disebut sebagai hubungan yang paternalistik.

Kewajiban untuk hormat dan taat kepada kiai merupakan fenomena identifikasi responden terhadap kiai dalam pemaknaan relasi interpersonalnya yang cenderung paternalistik merupakan bentuk modal sosial bagi kiai. Boudieu (1986) menjelaskan modal hubungan sosial yang jika diperlukan akan memberikan dukungan-dukungan yang bermanfaat. Raffo dan Revees (2000) yang menyebutkan modal sosial terkait erat dengan komunitarianisme, dengan

pandangan romantisnya tentang ikatan lokal dan solidaritas berbasis tradisi.

Fenomena identifikasi responden terhadap kiai yang menjadi modal sosial dalam kancah politik bagi kiai merupakan fenomena yang menjelaskan dinamika kepercayaan politik responden terhadap kiai. Penjelasan tersebut menurut Dirks dan Ferrin (2002) merupakan penjelasan dari *relationship-based perspective*. Perspektif ini melihat kepercayaan politik yang didasarkan oleh relasi interpersonal responden dengan kiai dalam kelompok (*ingroup*). Kepercayaan politik berdasarkan relasi dalam kelompok ini memiliki konsekuensi munculnya kategori kelompok atau sosial dalam batas *ingroup* dan *outgroup*. Pola kategorisasi sosial tersebut menciptakan sikap inklusivitas dalam kelompok yang ditunjukkan dengan menyatakan kiai yang merupakan pimpinan dari kelompoknya sebagai calon bupati yang lebih baik daripada calon lain yang bukan berasal dari kalangan kiai (*ingroup favoritism*).

Selain *relationship-based perspective*, Dirks dan Ferrin (2002) juga merumuskan *character-based perspective* untuk melihat pemaknaan kepercayaan politik responden kepada kiai. Dengan perspektif ini kepercayaan politik responden dilihat melalui penilaian terhadap konsistensi kompetensi dan performansi kiai sebagai pemimpin politik. Zhang dan Wang (2010) menjelaskan kepercayaan politik kepada pemerintah ditentukan oleh kesesuaian kebijakan yang

dihasilkan dengan harapan masyarakat secara umum.

Kecenderungan responden yang tidak (berpikir) kritis dalam memberikan kepercayaan politiknya karena sebagai remaja dalam konsep identitas yang dirumuskan Marcia (1980) bahwa responden sebagai mahasiswa santri memiliki status identitas: *foreclosure* (komitmen tanpa krisis).

Kesimpulan

Hasil penelitian ini secara spesifik mendeskripsikan dinamika psikologis yang mengkonstitusi kepercayaan politik mahasiswa santri terhadap kiai. Kepercayaan politik mahasiswa santri terhadap kiai merupakan bentuk identifikasi mahasiswa santri terhadap kiai.

Deskripsi dinamika identifikasi dalam pemaknaan relasi interpersonal mahasiswa santri dengan kiai yang ditransformasikan menjadi kepercayaan politik dapat disimpulkan sebagai berikut.

Hubungan interpersonal yang dijalin mahasiswa santri dengan kiai bersifat paternalistik, dimana mahasiswa santri menempatkan diri sebagai anggota kelompok memiliki kewajiban untuk hormat dan taat (sebagai nilai etis) kepada kiai yang ditempatkan sebagai pemimpin kelompok yang berimbas pada pola interaksi yang dijalani responden yang cenderung menunjukkan perilaku submisif dan tidak asertif.

Perilaku submisif dan tidak asertif mahasiswa santri dalam perspektif psikologi perkembangan merupakan konsekuensi dari pengaruh kiai yang sangat kuat sebagai otoritas dalam struktur sosial di pesantren.

Hubungan yang paternalistik tersebut dengan sendirinya menjadi modal sosial bagi kiai untuk mendapatkan kepercayaan politik dari mahasiswa santri yang termanifestasikan dalam bentuk dukungan politik.

Kepercayaan politik dihasilkan dari identifikasi mahasiswa santri terhadap kiai memiliki konsekuensi adanya kategori kelompok dalam batas *ingroup-outgroup* yang berimplikasi pada inklusivisme yang ditandai dengan sikap mengunggulkan kelompok (*ingroup favoritism*), yakni kiai yang ditempatkan sebagai pemimpin kelompok dalam struktur sosial di pesantren dianggap pemimpin politik yang lebih baik daripada pemimpin politik yang bukan dari kalangan kiai.

Kepercayaan politik yang dihasilkan dari identifikasi tersebut dikuatkan oleh penilaian responden terhadap konsistensi kompetensi dan performansi kiai sebagai pemimpin politik.

Identifikasi sebagai fenomena psikologis dalam kepercayaan politik mahasiswa santri terhadap kiai dalam perspektif psikologi perkembangan menunjukkan mahasiswa santri sebagai remaja akhir memiliki status identitas: *foreclosure* (komitmen tanpa krisis).

Kepustakaan

- Blind, Peri K. (2006). *Building trust in government in the twenty-first century: Review of literature and emerging issues*. Disampaikan pada 7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government, Vienna Austria, 26-29 June.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In John G. Richardson. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood Press.
- Citrin, J. (1974). Comment: The political relevance of trust in government. *The American Political Science Review*, 68(3), 973-988.
- Creswell, J. W. (2003). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- De Jonge, H. (1989). *Madura dalam empat zaman: Pedagang, perkembangan ekonomi dan Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren; Studi tentang pandangan hidup kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Dirks, K.T. & Ferrin, D. L. (2002) Trust in leadership: Meta-analytic finding and implication of research and practice. *Journal of Applied Psychology*, 71 (3), 500-507.
- Dukes, S. (1984). phenomenological methodology in the human science. *Journal of Religion and Health*, 23 (3), 197-203.
- Fadhillah, A. (2007). Budaya politik kiai pedesaan, studi kasus di kabupaten Lamongan, *Al-Qolam*, 24 (1), 37-54.
- Fischer, K. W. & Pruyne, E. (2003). Reflective thinking in adulthood. In J. Demick & C. Andreoletti (Eds.). *Handbook of Adult Development*. Newyork: Plenum Press.
- Geertz, C. (1981). *Abangan, santri, priyayi dalam masyarakat Jawa* (A. Mahasin, Pengalih bhs.). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Giorgi, A. (1970). Toward phenomenologically based research in psychology. *Journal of Phenomenological Psychology*, 1, 75-98.
- Hicks, A. M. & Misran, L. (1993). Political resources and the growth of welfare in affluent capitalist democracies, 1960-1982. *The American Journal of Sociology* 99, 668-710.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan petani Banten 1888* (Alih bahasa oleh Hasan Basari). Jakarta: Dunia Pustaka jaya.
- Kelman, H.C. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. *The Journal of Conflict Resolution*, 2 (1), 51-60.
- Kurasawa, (1993). *Mobilitas dan kontrol sosial: Studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942-1945* (Alih Bahasa oleh Hermawan Sulistyono). Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Luhman, N. (1988). Familiarity, confidence, trust: Problems & alternatives. In D. Gambetta, *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*. Cambridge, MA: Oxford University Press.
- Mansurnoor, I. A. (1990). *Islam in an Indonesian word ulama of Madura*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. In J. Kroger (Ed.), *Handbook of adolescent psychology*. New York: Wiley.
- Mayer, R. C., Davis, J. H. & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20, 709-734.
- Miller, P. J. E. & Rempel, J. K. (2004). Trust and partner-enhancing attributions in close relationships. *Personality and*

- Social Psychology Bulletin*, 30(6), 695-705.
- Misztal, B. (2001). Trust & cooperation: The democratic public sphere. *Journal of Sociology*, 37(4), 371-386.
- Mönks, F. J., Knoers, A. M. P. & Haditono, S. R. (2001). *Psikologi perkembangan: Pengantar dalam berbagai bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Montgomery, M. J. & Cote, J. E. (2003). College as a transition to adulthood. In G. R. Adams and M. D. Berzonsky (eds.) *Blackwell Handbook of Adolescence*. Malden MA : Blackwell Publishing.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research method*. Thousand oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Mufid, (1993). *Pesantren dalam sistem pendidikan nasional*. Jakarta: INIS.
- Padavic, I. & Ernest, W. R. (1994). Paternalism as a component of managerial strategy. *Social Science Journal*, 31 (4), 389-405.
- Papalia, D., Old, S.W. & Feldman, R. D. (2010). *Human development*. New York: Mc Graww Hill.
- Partha, D. & Ismail, S. (1999). *Social capital a multifaceted perspective*. Washington DC: The World Bank.
- Perry, W. G. (1970). *Forms of intellectual and ethical development in the college years: a scheme*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Prusack, L. & Cohen, D. (2001). How to invest in social capital, *Harvard Business Review*, 79(6), 87-93.
- Putnam, R. D. (1993). The prosperous community: social capital and public life. *The American Prospect*, 4 (13), 11-18.
- Raffo, C. & Revees, M. (2000). Youth transition and social exclusion: development in social capital theory. *Journal of Youth Studies*, 3 (2), 147-166
- Rotter, J. B. (1980). *Interpersonal trust, trustworthiness & gullibility*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Salkind, N.J. (2004). *An Introduction to theories of human development*. New Delhi: Sage Publication.
- Santrock, J. B. (2003). *Adolescence: Perkembangan masa remaja edisi keenam* Alih Bahasa: Achmad Chusairi dan Juda Damanik. Jakarta: Erlangga.
- Scanzoni, J. (1979). Social exchange and behavioral interdependence. In R. L. Burgess & T.L. Huston, *Social Exchange in Developing Relationships*. New York: Academic Press.
- Schyns, P. & Koop, C. (2010). Political distrust and social capital in Europe and the USA. *Social Indicators Research*, 96, 145-167
- Steinberg, L. & Silverberg, S. B. (1986). The vicissitudes of autonomy in early adolescence. *Child Development*, 57, 841-851.
- Syarif, Z. (2007). *Dinamika politik kiai dan santri dalam pilkada Pamekasan*. Disertasi, tidak diterbitkan, IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Wahid, A. (1988). Pesantren sebagai subkultur. Dalam Dawam Rahardjo (Ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Zakiah, L. & Faturrochman (2004). Kepercayaan santri pada kiai. *Buletin Fakultas Psikologi UGM*, 12 (1), 33-43.
- Zhang, Q. & Wang, E. (2010). Local political trust, the antecedents an effect on earthquake victim's choice for allocation of resource. *Social Behavior and Personality*, 38(7), 929-940.